

PENGENDALIAN DAN EVALUASI TERHADAP KEBIJAKAN
RENJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KENDAL
TAHUN 2023

Perangkat Daerah : INSPEKTORAT

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab ketidaksesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak ada		
1)	2)	3)	4)	5)	6)
1.	Pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah dan Penyusunan Agenda Kerja		✓		proses
2.	Pengolahan data dan informasi	✓			
3.	Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota	✓			
4.	Mengkaji hasil evaluasi renja Perangkat Daerah kabupaten/ kota tahun lalu berdasarkan renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota	✓			
5.	Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah kabupaten/ kota	✓			
6.	Penelaahan rancangan awal RKPD kabupaten/kota	✓			
7.	Perumusan tujuan dan sasaran	✓			
8.	Penelaahan usulan masyarakat	✓			
9.	Perumusan kegiatan prioritas	✓			
10.	Pelaksanaan forum Perangkat Daerah kabupaten/kota	✓			
10.a.	Menyelaraskan program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/ kota dengan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang Kecamatan	✓			
10.b.	Mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/ kota sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah kabupaten/ kota	✓			
10.c.	Mensinkronkan program dan kegiatan antar Perangkat Daerah kabupaten/kota dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan	✓			
10.d.	Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah kabupaten/kota sesuai format surat edaran Bupati/Walikota	✓			
11.	Sasaran program dan kegiatan perangkat Daerah kabupaten/kota disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu	✓			
12.	Program dan kegiatan antar Perangkat Daerah kabupaten/ kota dengan Perangkat Daerah lainnya dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah telah dibahas dalam forum Perangkat Daerah kabupaten/kota	✓			
13.	Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah kabupaten/kota telah menyusun dan memperhitungkan prakiraan maju	✓			
14.	Dokumen Renja Perangkat Daerah kabupaten/ kota yang telah disahkan				

Kendal, 2023
KEPALA BAPERLITBANG KABUPATEN KENDAL

IZZUDDIN LATIF, S.H., M.H.
Fembina
NIP. 197507042003121003

Lampiran : Pengendalian dan Evaluasi
Terhadap Kebijakan Renja
Perangkat Daerah Kabupaten
Kendal Tahun 2024

CATATAN :

- SK tim penyusun belum ada
- BAB I . Sesuai dgn yg saya coret :
- BAB II . Tabel TC. 29 disesuaikan .
- BAB III . Tabel 3.2 disesuaikan .

DAFTAR LAMPIRAN	
NO	URAIAN
1	SK TIM PENYUSUN
2	SK KASUBID
3	SK KASUBID
4	SK KASUBID



RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA - PD) TAHUN 2024



KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan karuniaNya, sehingga penyusunan Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah Inspektorat Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 dapat diselesaikan dengan lancar dan tidak ada halangan yang berarti.

Rencana Kerja Perangkat Daerah Inspektorat Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 merupakan tahun ketiga RPJMD Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026.

Mengamati pelaksanaan program dan kegiatan dari tahun ke tahun, peningkatan kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis telah berjalan sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan.

Rencana Kerja Perangkat Daerah Inspektorat Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 sebagai dokumen Perencanaan Organisasi Perangkat Daerah yang memuat kebijakan dan program/kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Inspektorat Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2024 dan untuk mereviu hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu serta perkiraan capaian tahun berjalan. Melalui Rencana Kerja ini pula diharapkan dapat memberikan kejelasan dan manfaat bagi institusi baik pemerintah maupun masyarakat.

Kendal,

2023

INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN KENDAL



TAVIP POERNOMO, S.H., M.M.

Pembina Utama Muda

NIP. 19640923 199011 1 003

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Bab I Pendahuluan.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	3
1.3 Maksud dan Tujuan	7
1.4 Sistematika Penulisan	7
Bab II Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu	9
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	9
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	29
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD.....	32
2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD	33
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan masyarakat.....	43
Bab III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	44
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi.....	44
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja PD	47
3.3. Program dan Kegiatan	49
Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah.....	85
4.1. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah.....	85
Bab V Penutup.....	180

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2024 merupakan penjabaran pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026. Tema pembangunan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2024 adalah “ Kendal *Smart City*, Kendal Handal, dan Kendal Melayani “. Pada tahun ini pembangunan akan menitikberatkan pada “ Perwujudan tata kelola Pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, transparan dan akuntabel didukung dengan konsep Kendal “ *Smart City* “. Disamping hal tersebut, arah kebijakan pembangunan Kabupaten Kendal juga melaksanakan pembangunan yang bersifat *mainstreaming* yaitu pembangunan gender, penanganan *Stunting* dan penanggulangan kemiskinan.

Sesuai dengan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Kendal Tahun 2024 adalah ” **Kendal *Smart City*** “ dengan prioritas pada “Perwujudan tata kelola Pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, transparan dan akuntabel didukung dengan konsep Kendal *Smart City*“. Arah kebijakan ini focus pada peningkatan kemantapan kelembagaan daerah, peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran, peningkatan *clean and good governances*, penguatan *smart city* yang difokuskan pada *Smart Government, Smart Education, Smart Health, Smart Economy, Smart Transportation*.

Pembangunan daerah yang menerapkan perencanaan yang SMART dan prinsip Money Follow Program Priority, dan Money Follow Result, diharapkan mampu untuk lebih mendorong potensi dan keunggulan daerah menuju kemandirian ekonomi daerah. Persiapan Penyusunan Renja Perangkat Daerah meliputi penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah, orientasi mengenai Renja Perangkat Daerah, penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja Perangkat Daerah, dan penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD.

Penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah bertujuan untuk menjamin kesesuaian

antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun berjalan bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah mencakup perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran pada rancangan awal RKPD.

Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 adalah sebuah Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Kendal yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kendal Tahun 2005 - 2025. Penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Tahun 2024 merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya dalam Rencana Strategis Inspektorat Daerah periode 2021 - 2026. Adapun hasil dari proses ini adalah berupa rencana kerja tahunan bagi Inspektorat Daerah.

Penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Kendal telah disesuaikan dengan arah kebijakan untuk tahun 2024, dengan memperhatikan permasalahan pembangunan, capaian kinerja dan target capaian kinerja dalam menyusun program/kegiatan/sub kegiatan. Perencanaan kinerja ini merupakan suatu aktivitas analisis dan pengambilan keputusan dimasa yang akan datang untuk menetapkan tingkat kinerja yang diinginkan dimasa yang akan datang, sehingga pokok dari perencanaan kinerja adalah penetapan tingkat capaian kinerja yang dinyatakan melalui ukuran kinerja atau indikator kinerja dalam rangka pencapaian sasaran atau target yang telah ditetapkan. Secara umum perencanaan kinerja ini merupakan alat manajemen sebagai upaya peningkatan kinerja yang mengutamakan daya analisis dalam Rencana Kerja Inspektorat Daerah Tahun 2024 menentukan target yang realistis.

Oleh karena itu dalam Rencana Kerja ini akan dicantumkan Program dan Kegiatan yang terinci untuk jangka pendek sebagai penerjemah dari sasaran-sasaran yang telah ditetapkan. Selain itu dalam perencanaan kinerja, tidak hanya menyangkut langkah-langkah kegiatan yang akan dilaksanakan dalam upaya pencapaian target, akan tetapi meliputi pengaturan berbagai sumber baik yang telah dimiliki maupun yang diperlukan secara optimal.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 219) dan Peraturan Bupati Kendal Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kendal, Inspektorat Daerah merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah.

1.2. Landasan Hukum

Dalam penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Kendal tahun 2024 ini berdasarkan pada landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 590);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2008 Nomor 2 Seri E No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 30);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal Tahun 2011-2031

(Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2011 Nomor 20 Seri E No. 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 84) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 198);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 219);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 214);
21. Peraturan Bupati Kendal Nomor 37 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor 37);

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renja Perangkat Daerah adalah tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan tahunan bagi Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran dari pembangunan jangka menengah dan panjang. Tujuan penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan selama kurun waktu 1 (satu) tahun yaitu tahun 2024;
2. Memberikan arahan yang jelas atas target kinerja dari masing-masing program dan kegiatan Inspektorat Daerah tahun 2024;

3. Sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja program dan kegiatan Inspektorat Daerah tahun 2024;
4. Untuk mengoptimalkan peran, fungsi dan mewujudkan tugas pengawasan tahun 2024 secara umum terhadap penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Kabupaten Kendal dapat dilaksanakan sesuai visi, misi, tujuan, sasaran dan arah kebijakan yang telah ditetapkan.;
5. Memberikan acuan yang lebih rasional bagi Perangkat Daerah dalam menyelaraskan indikator kinerja kegiatan sampai dengan akhir tahun anggaran;

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Perangkat Daerah Inspektorat Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan rencana kerja (Renja) Inspektorat Daerah Tahun 2024.

Bab II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

Memuat evaluasi pelaksanaan renja Inspektorat Daerah Kabupaten Kendal tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan, selanjutnya dikaitkan dengan target Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Kendal berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Kendal tahun – tahun sebelumnya.

Bab III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Berisi ulasan tentang perumusan tujuan dan sasaran, yang didasarkan atas penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas fungsi Perangkat Daerah, rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah serta uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan serta sub kegiatan.

Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Berisi ulasan tentang penjelasan mengenai Uraian garis besar rekapitulasi program dan kegiatan yang meliputi Jumlah program dan jumlah kegiatan

Bab V Penutup

Menjelaskan catatan-catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam pelaksanaannya, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi pelaksanaan renja perangkat daerah tahun 2022 dan capaian renstra perangkat daerah Tahun 2021-2026. Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan renja perangkat daerah tahun 2022 (tahun n-2) dan perkiraan capaian renja perangkat daerah tahun 2023 (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan renja perangkat daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target renstra perangkat daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan renja perangkat daerah tahun-tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi pelaksanaan renja perangkat daerah tahun lalu, dan realisasi renstra perangkat daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan perangkat daerah dan/atau realisasi APBD untuk perangkat daerah yang bersangkutan.

Dengan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Inspektorat ditahun sebelumnya, maka akan didapat gambaran atas pelaksanaan program dan kegiatan yang ada yaitu :

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yng direncanakan
2. Realisasi program/kegiatan yang yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya,terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat daerah dan
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi factor-faktor penyebab tersebut.

Dalam melakukan penyusunan Renja Inspektorat Daerah tahun 2024 diperlukan adanya evaluasi atas pelaksanaan Renja 3 (tiga) tahun sebelumnya yaitu evaluasi capaian Renja ditahun 2020, 2021 dan 2022

serta evaluasi terhadap proyeksi capaian Renja untuk tahun berjalan yaitu tahun 2023. Evaluasi dilaksanakan dengan membandingkan proyeksi capaian akhir Renja sampai dengan tahun yang berjalan yaitu 2022 terhadap target tahun 2023 sesuai dengan Renstra Inspektorat Daerah tahun 2021 – 2026.

Tingkat pencapaian Program dan Kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Kendal terdiri dari 3 program dan 10 kegiatan. Kegiatan secara umum dapat dilaksanakan dengan baik dengan penyerapan anggaran sebesar 85.52 % dan capaian fisik sebesar 97,53 %.

Hasil Renja PD Inspektorat Daerah Tahun Anggaran 2022 secara umum telah dilaksanakan dengan optimal dan sesuai dengan target yang ditetapkan. Adapun secara rinci evaluasi pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah Tahun 2022 diuraikan pada Lampiran 1, sedangkan secara singkat hasil Kegiatan tahun Anggaran 2022 diuraikan sebagai berikut :

Tabel 2.1.
Realisasi Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Yang Tidak memenuhi / Memenuhi Target Kinerja Hasil/ Keluaran Yang Direncanakan

No	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran	Target	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik	Memenuhi/ Tidak Memenuhi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	16.346.282.760	100%	85,37%	98,11%	Memenuhi
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	53.000.000	100%	81.47%	85,39%	Memenuhi
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.000.000	6 dok	59,28%	100%	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	50.000.000	50 laporan	82,8%	84,51%	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.388.459.640	100 %	85,4 %	99,25%	Memenuhi
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.198.459.640	14 bulan	85,12 %	99,24%	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	190.000.000	12 bulan	99,09%	100%	-
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	-	-	-	-
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	-	-	-	-	-

No	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran	Target	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik	Memenuhi/ Tidak Memenuhi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)
	Daerah					
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	363.150.000	100 %	85,56%	94,13%	Memenuhi
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	-	-	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	247.500.000	45 orang	88,47%	99,86%	
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	65.650.000	50 orang	74,25%	100%	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan.	50.000.000	45 orang	85,99%	58,1%	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	619.790.000	100%	81,91%	83,39%	Memenuhi
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	3.000.000	14 jenis	22,73%	100%	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50.000.000	65 jenis	95,04%	95,46%	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	90.000.000	1434 dus	65,18%	70,71%	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	50.000.000	17 jenis	52,87%	52,52%	
	Penyediaan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	3.000.000	24 eksemplar	75,33%	100%	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	423.790.000	12 bulan	87,8%	88,07%	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	1.600.000.000	100 %	94,6%	100%	Memenuhi
	Pengadaan Mebel	1.300.000.000	1 set	93,79%	100%	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	120.000.000	25 unit	99,04%	100%	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	180.000.000	1 set	97,51%	100%	
	Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	501.100.000	100 %	79,71%	90,51%	memenuhi
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.000.000	200 lembar	99,52%	99,78%	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	187.100.000	12 bulan	79,46%	100%	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	170.000.000	12 bulan	78,29%	80,61%	
	Penyediaan Jasa Pelayanan	140.000.000	12 bulan	81,18%	89,59%	

No	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran	Target	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik	Memenuhi/ Tidak Memenuhi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)
	Umum Kantor					
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintahan Daerah	3.820.783.120	100 %	82,78%	98,43%	Memenuhi
	Penyediaan, Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	200.000.000	41 unit	69,06%	70,03%	
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3.519.723.120	1 unit	83,29%	100%	
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	101.060.000	1 unit	92,02%	100%	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	740.187.000	100 %	94,66%	95,16%	Memenuhi
	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	605.000.000	100 %	94,54%	94,88%	Memenuhi
	Pengawasan Kinerja Pemerintahan Daerah	430.000.000	150 obrik	98,6%	98,84%	
	Reviu Laporan Keuangan	50.000.000	5 laporan	93,00%	93,18%	
	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	125.000.000	120 obrik	81,18%	81,96%	
	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	135.187.000	100 %	95,17%	96,41%	Memenuhi
	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	135.187.000	40 obrik	95,17%	96,41%	
3.	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	281.813.000	100 %	69,97%	70,13%	Memenuhi
	Pendampingan dan Asistensi	281.813.000	100 %	69,97%	70,13%	Memenuhi
	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	101.480.000	49 orang	65,43%	65,37%	
	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi.	18.333.000	15 opd	80,35%	80,02%	
	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	132.000.000	6 laporan	76,82%	76,92%	
	Pendampingan, Asistensi dan	30.000.000	4.000	48,87%	50,33%	

No	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran	Target	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik	Memenuhi/ Tidak Memenuhi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)
	Verifikasi Penegakan Integritas		laporan			

Berdasarkan tabel diatas dapat kami simpulkan sebagai berikut :

Untuk capaian kinerja indikator program pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 dari ketiga Program Yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota, Program Penyelenggaraan Pengawasan, Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi telah memenuhi target sesuai dengan yang ditentukan.

Untuk Realisasi Keuangan dari ke tiga program, 10 kegiatan dan 34 sub kegiatan tidak 100% dapat terealisasi dikarenakan adanya efisiensi anggaran, adanya sub kegiatan yang sifatnya pencadangan sehingga tidak dapat terealisasi semuanya karena disesuaikan dengan kebutuhan yang ada atau tidak bisa diprediksikan dengan pasti. Sedangkan permasalahan secara umum dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kendal adalah :

1. Banyaknya aduan dari masyarakat yang masuk langsung ke Inspektorat Daerah dan melalui Aplikasi Span lapor, *wishtleblower system* (WBS), dan kanal chat whatshapp dico mendengar belum bisa semuanya ditindaklanjuti ini dikarenakan adanya keterbatasan jumlah APIP yang ada di Inspektur Pembantu Khusus sebagai pemangku tugas dan fungsi atas aduan masyarakat tersebut.
2. Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) belum bisa memenuhi target yang telah ditentukan.
3. Banyaknya tugas-tugas yang bersifat mandatori yang harus diselesaikan dengan cepat dan dalam waktu yang sudah ditentukan menyebabkan penugasan yang bersifat rutin yang sudah direncanakan dalam PKPT menjadi tidak tercapai dikarenakan jumlah APIP yang masih kurang.
4. Belum melakukan penilaian risiko kecurangan (*fraud risk assessment*) Kepada semua OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal dan melakukan reviu secara berkala.

Strategi untuk pemecahan masalah yang ditempuh adalah :

1. Melakukan perhitungan secara tepat untuk menambah SDM APIP sesuai dengan kebutuhan.
2. Melakukan pendampingan dengan BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah untuk meningkatkan level capaian dari Kapabilitas APIP.
3. Menyusun PKPT Berbasis Risiko yang berfokus pada kegiatan yang berisiko tinggi dan mengawal visi, misi Bupati agar dapat tercapai.
4. Melaksanakan bimbingan teknis atau workshop kepada semua OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal untuk melakukan register risiko kecurangan, meningkatkan SDM APIP dengan cara mengundang BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah menjadi Narasumber terkait revidi dan penilaian risiko kecurangan.

Hasil evaluasi program dan kegiatan sampai dengan tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel 2.2 (T-C. 29) sebagai berikut :

Tabel T-C.29.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023
Kabupaten Kendal

Nama Perangkat Daerah : Inspektorat Daerah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
6	PENGAWASAN									
6 01	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Pengawasan									
6 01 02	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Prosentase Ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %							
	Perencanaan, Penganggaran,	Persentase Ketercapaianny								

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dok	0 Dok	6 Dok	6 Dok	1,00	6 Dok	12 Dok	2 %
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	53 lap	1 Keg	53 lap	35 lap	0,66	53 lap	89 lap	1,68 %
	administrasi Keuangan Perangka daerah	Persentase Ketercapaiannya administrasi keuangan perangkat daerah								
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	57 Orang/ bulan	14 bulan	14 bulan	14 bulan	1,00	57 org/ bulan	85 Org/ bulan	1.5 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022				Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023			
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi %	12		Dok	36	Dok	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6				7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 Dok	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bula n	1,00	12	Dok	36	Dok	3,0 %
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap	1,00	1	lap	3	lap	3,0%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan Semesteran	- lap	2 lap	2 lap	2 lap	2 lap	1,00	- lap	4 lap	-		-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaiannya administrasi kepegawaian perangkat daerah								
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	60 paket	65 stel	- stel	- stel	- -	- stel	65 stel	1,08 %
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan tugas dan fungsinya	Jumlah Pegawai Berdasarkan tugas dan fungsinya yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	55 org	40 Org	45 org	37 org	0,82	55 org	132 org	2,4 %
	Sosialisasi Peraturan Perundang- undangan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan	150 org	2 keg	50 org	50 org	1,00	150 org	202 org	1,347 %

Kode	Usuan/Bidang Usuan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		perundang-undangan								
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	55 org	45 org	45 org	36 org	0,8	55 org	136 org	2,47 %
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaiannya administrasi umum perangkat daerah								
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	16 paket	12 bulan	14 jenis	10 jenis	0,71	16 paket	38 paket	2,375 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		disediakan								
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan	65 paket	12 bulan	65 Jenis	61,75	0,92	65 paket	138,75	2,135%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	1.500 paket	1554 dus	1.434 dus	932 dus	0,65	1.450 paket	3.936 paket	2,624 %
	Penyediaan Barang Cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	17 paket	17 jenis	17 jenis	8,99	0,53	17 paket	42,99 jenis	2,53 %
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	24 dok	24 eksemplar	24 eksemplar	18,08	0,75	24 dok	66,08 dok	2,75 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 lap	12 bin	12 bln	10,49 bln	0,87	12 lap	34,49 lap	2,87 %
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketercapaiannya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
	Pengadaan Mebel	Jumlah Kebutuhan Meubeler yang harus disediakan	- Unit	- Unit	1 set	1 set	1,00	- unit	2 Unit	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	1 unit	3 unit	- unit	- unit	-	8 unit	11 unit	9,09 %
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	5 Unit	- Unit	25 Unit	9 Unit	0,36	10 Unit	19 Unit	3,8 %
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana yang disediakan	- Unit	- Unit	1 Set	1 set	1,00	6 unit	7 Unit	-
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaiannya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah								
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500 Lap	700 bh	200 lembar	180 lembar	0,9	420 laporan	1300 lembar	2,6 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022				Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023		
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi %	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air, dan Telepon yang disediakan	12 laporan	12 bln	12 bln	12 bln	1,00	12 laporan	36 laporan	3%		
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	12 laporan	12 bln	12 bln	10 bln	1,00	12 laporan	34 laporan	2,83 %		
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 laporan	12 bln	12 bln	12 bln	1,00	12 lapora n	36 lapora n	3 %		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase Ketercapaiannya Pemeliharaan Barang Milik Daerah										

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
Daerah		Pennunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	36 unit	32 unit	41 unit	39 unit	0,95	36 unit	107 unit	2,97 %
	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang dipelihara	1 Unit	- unit	- unit	- unit	-	- unit	- unit	-
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	1 unit	1 unit	1 Unit	1 Unit	1,00	1 Unit	3 Unit	3 %
	Pemeliharaan/	Jumlah	- unit	12 bulan	1 unit	1 unit	1,00	- unit	13 unit	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022				Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023						
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi %	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)						
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)						
	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Perlengkapan Gedung Kantor yang terpelihara														
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Prosentase tercapainya penyelenggaraan pengawasan di daerah	100%													
	Penyelenggaraan Pengawasan internal	Persentase Ketercapaiannya Penyelenggaraan Pengawasan Internal	100 %													
	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah laporan hasil pengawasan kinerja Pemerintah Daerah	150	Laporan	150	obyek	150	obrik	80	obrik	0,53	150	laporan	380	laporan	2,53 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022				Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023		
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi %	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)		
1	2	3	4	5	6		7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)		11=(10/4)
	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	4 lap	4 lap	5 lap	4 lap	0,8	5 lap	13 lap	3,25 %		
	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APJP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APJP	140 Dok	52 org	120 obrik	85 obrik	0,70	140 Dok	277 Dok	1,98%		
	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Laporan hasil pengawasan dengan tujuan tertentu										
	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah laporan hasil Pengawasan dengan tujuan tertentu	40 lap	52 org	40 obrik	30 obrik	0,75	40 lap	122 lap	3,05%		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023							
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)						
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)						
	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Prosentase hasil perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi	100%													
	Pendampingan dan Asistensi	Persentase Ketercapaiannya Pendampingan dan Asistensi	100 %													
	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	50	Perangkat daerah	52	org	49	org	39	org	0,8	49	Perang kat Daerah	140	org	2,8%
	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan	60	Perangkat Daerah	1	lap	15	OPD	13	OPD	0,86	49	Perang kat Daerah	63	Perang kat Daerah	1,05%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Penilaian Reformasi Birokrasi	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi								
	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	1 Keg	1 Keg	6 lap	- lap	-	6 Keg	7 Keg	7 %
	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Pengendalian Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Pengendalian Integritas	57 Perangkat Daerah	- Keg	4000 lap	3992 lap	0,998	57 Perang kat Daerah	57 Perang kat Daerah	1 %

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Kendal Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kendal, Inspektorat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Inspektorat Daerah mempunyai fungsi :

1. perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
2. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya ;
3. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan bupati dan/ atau Gubernur sebagai Wakil pemerintah Pusat;
4. penyusunan laporan hasil pengawasan ;
5. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
6. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
7. pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah;dan
8. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam manajemen penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pengawasan mempunyai fungsi memberikan umpan balik untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan serta memberikan jaminan agar tujuan dapat tercapai secara efisien, efektif dan sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Inspektorat Daerah tidak memiliki aturan mengenai SPM. Namun tolok ukur kinerjanya berdasarkan ketepatan waktu dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan berdasarkan SOP. Selama ini ketepatan waktu tersebut selalu dapat dijaga dan dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Kendal. Baik dalam pengawasan reguler/khusus, reviu dokumen perencanaan dan keuangan maupun penanganan pengaduan masyarakat, pengawasan yang bersifat mandatori.

TABEL T-C 30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Inspektorat Daerah
Kabupaten Kendal

NO	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022 (Thn-2)	Tahun 2023 (Thn-1)	Tahun 2024 (Thn-n)	Tahun 2025 (Thn+1)	Tahun 2022 (Thn-2)	Tahun 2023 (Thn-1)	Tahun 2024 (Thn-n)	Tahun 2025 (Thn+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Indikator Kinerja Utama (IKU)											
1	Maturitas SPIP			Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 2	Level 3	Level 3	Level 3	
2	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)			Level 2	Level 3	Level 3	Level 3	Level 2	Level 2	Level 3	Level 3	
	Indikator Kinerja Program											
1	Maturitas SPIP			Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 2	Level 3	Level 3	Level 3	
2	Kapabilitas Aparat			Level 2	Level 3	Level 3	Level 3	Level 2	-	Level 3	Level 3	Utk realisasi tahun 2023 belum keluar nilainya

NO	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022 (Thn-2)	Tahun 2023 (Thn-1)	Tahun 2024 (Thn-n)	Tahun 2025 (Thn+1)	Tahun 2022 (Thn-2)	Tahun 2023 (Thn-1)	Tahun 2024 (Thn-n)	Tahun 2025 (Thn+1)		
													karena masih berada ditahap evaluasi dengan tim BPKP
3	Nilai SAKIP Organisasi Perangkat			80,10	80,15	80,20	80,25	67,83	-	80,20	80,25		Masih dalam tahap evaluasi di Kemenpan RB
4	Nilai rata-rata SAKIP Perangkat Daerah yang			68,55	70,25	72,25	73,55	79,50	79,95	72,25	73,55		
5	Nilai PMPRB			B	B	B	B	B	-	B	B		Belum ada penilaian, penilaian dilaksanakan dibulan November

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Perubahan system manajemen pemerintahan daerah dan sistem pengelolaan keuangan daerah memberikan perubahan paradigma tugas pengawasan yang dilakukan Inspektorat Daerah Kabupaten sebagai APIP. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menekankan arti pentingnya system pengawasan intern dilingkungan pemerintah secara menyeluruh untuk mewujudkan tata kelola keuangan daerah berdasarkan prinsip Good Government.

Sejalan dengan otonomi daerah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengamanatkan pentingnya system pengendalian intern atas penyelenggaraan pemerintah daerah yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka mencapai tujuan otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab.

Isu strategis pembinaan dan pengawasan merupakan permasalahan yang berkaitan fenomena atau yang belum dapat diselesaikan tahun-tahun sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi berkesinambungan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sehingga perlu diatasi secara bertahap.

Isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Kendal adalah sebagai berikut :

1. Tuntutan peningkatan pelayanan publik kepada masyarakat
2. Tuntutan peningkatan kapabilitas APIP
3. Optimalnya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di jajaran Organisasi Perangkat Daerah.
4. Masih banyaknya aduan masyarakat terhadap pelayanan publik.
5. Belum optimalnya manajemen pengelolaan data di setiap OPD sehingga berdampak pada pengukuran evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pengawasan.
6. Organisasi Perangkat Daerah dalam menindaklanjuti temuan hasil pengawasan sering tidak tepat waktu terutama hasil temuan BPK RI.
7. Tuntutan peningkatan integritas dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, terutama pada upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi.

8. Belum terpenuhinya jumlah Fungsional Auditor sesuai dengan perhitungan yang dibutuhkan sehingga menyebabkan Jadwal Program Kerja Pengawasan Tahunan yang sudah ditetapkan belum dapat tercapai sesuai target yang telah ditentukan, Penugasan untuk melakukan pemeriksaan yang masih bertumpuk-tumpuk karena semakin banyaknya pengawasan yang bersifat mandatori.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review atau telaah terhadap rancangan awal RKPD adalah dilakukan dengan membandingkan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Proses perbandingan tersebut meliputi perbandingan program, kegiatan, lokasi kegiatan, target dan pagu anggaran yang disediakan pada rancangan awal RKPD.

Setiap OPD wajib membuat dan memiliki Renja Perangkat Daerah, yang disusun berdedoman pada Renstra Perangkat Daerah, dan mengacu pada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar untuk penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS). RKPD berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan Renja Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Perangkat Daerah Inspektorat Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 mengacu pada visi dan misi Bupati dan wakil bupati terpilih yaitu “Kendal Handal, Unggul, Makmur dan Berkeadilan” dengan misi kelima adalah Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, berbasis elektronik dan bebas korupsi, dengan memberikan ruang yang luas bagi partisipasi masyarakat dalam proses perumusan hingga evaluasi kebijakan. Arah kebijakan Pembangunan Kabupaten Kendal Tahun 2024 adalah **“Kendal Smart City”** dengan prioritas pada **perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih transparan dan akuntabel didukung dengan konsep Kendal Smart City.**

Arah Kebijakan ini focus pada peningkatan kemantapan kelembagaan daerah, peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran, peningkatan *clean and good governances*, penguatan *smart city* yang difokuskan pada *smart government*, *smart education*, *smart health*, *smart economy* dan *smart transportation*

Sedangkan tema pembangunan daerah tahun 2024 lebih ditekankan pada :

1. Meningkatnya kualitas layanan publik melalui partisipasi masyarakat, peningkatan peran serta teknologi IT dan mendorong inovasi pelayanan publik;
2. Terwujudnya pelestarian kebudayaan;
3. Terwujudnya pelestarian cagar budaya;
4. Meningkatnya pembinaan dan promosi kesehatan kepada masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat;
5. Melaksanakan pemberdayaan dan meningkatkan peran serta masyarakat di bidang kesehatan;
6. Memberikan jaminan social terhadap penduduk rawan pangan;
7. Mengembangkan semangat kebersamaan dan toleransi dalam masyarakat;
8. Memperkuat nilai-nilai kebhinekaan dalam kehidupan bermasyarakat dan menciptakan ruang-ruang dialog antar warga;
9. Menciptakan kondisi yang kondusif dan kerukunan dalam kehidupan masyarakat yang majemuk; dan
10. Menumbuhkan komitmen persamaan hak dan kewajiban dalam kehidupan masyarakat yang majemuk.

Program dan kegiatan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kendal mulai tahun 2021 sudah mengacu pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 namun pada pagu indikatif dan kebutuhan dana yang berbeda besarnya disesuaikan dengan kegiatan tahun yang direncanakan.

Adapun hasil telaah terhadap rancangan awal RKPD adalah sebagaimana tabel sebagai berikut :

Tabel T-C.31.
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2024
Kabupaten Kendal

Nama Perangkat Daerah: Inspektorat Daerah

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikator (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)			
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)		
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab.Kendall	Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah Persentase Ketercapaian Penunjan Urusan Perangkat Daerah	100 %	11.786.579.000,00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab.Kendall	Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah Persentase Ketercapaian Penunjan Urusan Perangkat Daerah	100 %	11.786.579.000,00			
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kendal	Persentase Ketercapaiannya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	145.000.000,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kendal	Persentase Ketercapaiannya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	145.000.000,00			
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Kendal	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	20.000.000,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Kendal	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	20.000.000,00			
	Evaluasi kinerja perangkat Daerah	Kab. Kendal	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	53 Laporan	125.000.000,00	Evaluasi kinerja perangkat Daerah	Kab. Kendal	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	53 Laporan	125.000.000,00			
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Kendal	Persentase Ketercapaiannya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	8.572.079.000,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Kendal	Persentase Ketercapaiannya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	8.572.079.000,00			
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	Kab. Kendal	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan	57 Orang/bulan	8.370.579.000,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	Kab. Kendal	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan	57 Orang/bulan	8.370.579.000,00			

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan (2)	Lokasi (3)	Indikator kinerja (4)	Target capaian (5)	Pagu Indikatif (Rp.000) (6)	Program/ Kegiatan (7)	Lokasi (8)	Indikator kinerja (9)	Target capaian (10)	Kebutuhan Dana (Rp.000) (11)		
(1)	ASN		Tunjangan ASN			ASN		Tunjangan ASN			(12)	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Kendal	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	198.000.000,00	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Kendal	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	198.000.000,00		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Kendal	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	3.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Kendal	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	3.500.000		
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Kendal	Persentase Ketercapaiannya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	1.102.000.000,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Kendal	Persentase Ketercapaiannya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	1.102.000.000,00		
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Kendal	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	60 paket	65.000.000,00	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Kendal	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	60 paket	65.000.000,00		
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Kendal	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	55 orang	810.000.000,00	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Kendal	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	55 orang	810.000.000,00		
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Kendal	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan	150 orang	87.000.000,00	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Kendal	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan	150 orang	87.000.000,00		

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan (2)	Lokasi (3)	Indikator kinerja (4)	Target capaian (5)	Pagu indikator (Rp.000) (6)	Program/ Kegiatan (7)	Lokasi (8)	Indikator kinerja (9)	Target capaian (10)	Kebutuhan Dana (Rp.000) (11)			
(1)			Perundang-Undangan					Perundang-Undangan				(12)	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Kendal	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	55 orang	140.000.000,00	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Kendal	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	55 orang	140.000.000,00			
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Kendal	Persentase Ketercapaiannya Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Ketercapaiannya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	643.500.000,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Kendal	Persentase Ketercapaiannya Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Ketercapaiannya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	643.500.000,00			
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Kendal	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	16 paket	12.000.000,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Kendal	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	16 paket	12.000.000,00			
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Kendal	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	65 paket	84.000.000,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Kendal	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	65 paket	84.000.000,00			
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Kendal	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1.500 paket	119.000.000,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Kendal	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1.500 paket	119.000.000,00			

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting (12)
	Program/ Kegiatan (2)	Lokasi (3)	Indikator kinerja (4)	Target capaian (5)	Pagu indikator (Rp.000) (6)	Program/ Kegiatan (7)	Lokasi (8)	Indikator kinerja (9)	Target capaian (10)	Kebutuhan Dana (Rp.000) (11)			
(1)	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Kendal	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	17 paket	75.000.000,00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Kendal	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	17 paket	75.000.000,00			
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undang an	Kab. Kendal	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	24 dokumen	3.500.000,00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undang an	Kab. Kendal	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	24 dokumen	3.500.000,00			
	Penyelenggar aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Kendal	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	350.000.000,00	Penyelenggar aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Kendal	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	350.000.000,00			
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Kendal	Persentase Ketercapaiannya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	50.000.000,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Kendal	Persentase Ketercapaiannya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	50.000.000,00			
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Kendal	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 unit	-	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Kendal	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 unit	-			
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Kendal	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 unit	50.000.000,00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Kendal	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 unit	50.000.000,00			

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)			
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)		
(1)	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Kendal	Persentase Ketercapaiannya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	682.130.000,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Kendal	Persentase Ketercapaiannya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	682.130.000,00			
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Kendal	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500 Laporan	5.000.000,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Kendal	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500 Laporan	5.000.000,00			
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kab. Kendal	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	300.000.000,00	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kab. Kendal	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	300.000.000,00			
	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Kab. Kendal	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 laporan	187.130.000,00	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Kab. Kendal	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 laporan	187.130.000,00			
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Kendal	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	190.000.000,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Kendal	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	190.000.000,00			
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kab. Kendal	Persentase Ketercapaiannya Pemeliharaan	100 %	591.870.000,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kab. Kendal	Persentase Ketercapaiannya Pemeliharaan	100 %	591.870.000,00			

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan (2)	Lokasi (3)	Indikator kinerja (4)	Target capaian (5)	Pagu indikatif (Rp.000) (6)	Program/ Kegiatan (7)	Lokasi (8)	Indikator kinerja (9)	Target capaian (10)	Kebutuhan Dana (Rp.000) (11)			
											(12)		
(1)	Pennunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Barang Milik Daerah Pennunjang Urusan Pemerintah Daerah			Pennunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Barang Milik Daerah Pennunjang Urusan Pemerintah Daerah					
	Penyediaan jasa pemeliharaan , Pajak dan biaya perizinan kendaraan dinas operasional atau Lapangan	Kab. Kendal	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	36 unit	218.126.000,00	Penyediaan jasa pemeliharaan , Pajak dan biaya perizinan kendaraan dinas operasional atau Lapangan	Kab. Kendal	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	36 unit	218.126.000,00			
	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Kab. Kendal	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 unit	85.000.000,00	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Kab. Kendal	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 unit	85.000.000,00			
	Pemeliharaan n/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Kendal	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 unit	288.744.000,00	Pemeliharaan n/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	KABUPATEN KENDAL	Jumlah Pemeliharaan Gedung Inspektorat	1 unit	3.674.407.500			
	Pemeliharaan n/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Kendal	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	0 unit	-	Pemeliharaan n/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Kendal	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	0 unit	-			
	PROGRAM PENYELENGGAR AAN PENGAWASAN	Kab. Kendal	Prosentase tercapainya penyelenggaraan pengawasan di daerah	100 %	1.760.000.000,00	PROGRAM PENYELENGGAR AAN PENGAWASAN	Kab. Kendal	Prosentase tercapainya penyelenggaraan pengawasan di daerah	100 %	1.760.000.000,00			
	Penyelenggaraan Pengawasan	Kab. Kendal	Persentase Ketercapaiannya	100 %	1.460.000.000,00	Penyelenggaraan Pengawasan	Kab. Kendal	Persentase Ketercapaiannya	100 %	1.460.000.000,00			

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan (2)	Lokasi (3)	Indikator kinerja (4)	Target capaian (5)	Pagu indikatif (Rp.000) (6)	Program/ Kegiatan (7)	Lokasi (8)	Indikator kinerja (9)	Target capaian (10)	Kebutuhan Dana (Rp.000) (11)	(12)		
(1)	Interna		Penyelenggaraan Pengawasan Internal			Interna		Penyelenggaraan Pengawasan Internal					
	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Kab. Kendal	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	150 laporan	975.000.000,00	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Kab. Kendal	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	150 laporan	975.000.000,00			
	Reviu Laporan Keuangan	Kab. Kendal	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	4 laporan	195.000.000,00	Reviu Laporan Keuangan	Kab. Kendal	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	4 laporan	195.000.000,00			
	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APiP	Kab. Kendal	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APiP	140 dokumen	290.000.000,00	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APiP	Kab. Kendal	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APiP	140 dokumen	290.000.000,00			
	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Kab. Kendal	Persentase Ketercapaian Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	100 %	300.000.000,00	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Kab. Kendal	Persentase Ketercapaian Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	100 %	300.000.000,00			
	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Kab. Kendal	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	40 orang	300.000.000,00	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Kab. Kendal	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	40 orang	300.000.000,00			
	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Kab. Kendal	Prosentase hasil perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi	100 %	600.000.000,00	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Kab. Kendal	Prosentase hasil perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi	100 %	600.000.000,00			

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting (12)
	Program/ Kegiatan (2)	Lokasi (3)	Indikator kinerja (4)	Target capaian (5)	Pagu Indikatif (Rp.000) (6)	Program/ Kegiatan (7)	Lokasi (8)	Indikator kinerja (9)	Target capaian (10)	Kebutuhan Dana (Rp.000) (11)		
(1)	Pendampingan dan Asistensi	Kab. Kendal	Persentase Ketercapaianya Pendampingan dan Asistensi	100 %	600.000.000,00	Pendampingan dan Asistensi	Kab. Kendal	Persentase Ketercapaianya Pendampingan dan Asistensi	100 %	600.000.000,00		
	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Kendal	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	50 perangkat daerah	195.000.000,00	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Kendal	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	50 perangkat daerah	195.000.000,00		
	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokras	Kab. Kendal	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokras	60 perangkat daerah	65.000.000,00	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokras	Kab. Kendal	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokras	60 perangkat daerah	65.000.000,00		
	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kab. Kendal	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	1 keg	280.000.000,00	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kab. Kendal	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	1 keg	280.000.000,00		
	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Kab. Kendal	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	57 perangkat daerah	60.000.000,00	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Kab. Kendal	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	57 perangkat daerah	60.000.000,00		

2.5. Penelaahan Usulan program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam penyusunan program dan kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Kendal selama ini didasarkan pada tugas pokok dan fungsi serta kebijakan program pengawasan dari Kementerian Dalam Negeri dan belum melibatkan secara langsung aspirasi dari masyarakat. Namun demikian isu-isu strategis maupun permasalahan yang berkembang di masyarakat dijadikan pertimbangan untuk penetapan sasaran program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.

Tabel T-C.32.
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2024 Kabupaten Kendal

Nama Perangkat Daerah : Inspektorat Daerah

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	N I H I L				-

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Pembangunan nasional merupakan upaya semua komponen bangsa yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan berdasarkan Pancasila. Pencapaian tujuan ini dilaksanakan secara bertahap, mulai dari jangka panjang, jangka menengah, hingga tahunan. Rencana pembangunan jangka panjang nasional 2005-2025 menggariskan Visi Indonesia tahun 2025 yaitu INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR yang pelaksanaannya dibagi ke dalam 4 (empat) tahap pembangunan jangka menengah.

Tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 adalah “Peningkatan Produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusi dan berkelanjutan. Adapun Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Beradilan;
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan terhadap Bencana dan Perubahan Iklim; dan
7. Memperkuat Stabilitas Polhukam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 diarahkan pada tema :

“Peningkatan Perekonomian Daerah yang berdaya saing dan merata, didukung dengan sumber daya manusia yang berkualitas”

Adapun prioritas pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 meliputi :

1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sector unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infrastruktur yang merata dan berkualitas;
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar dan adaptif secara inklusif dan merata;
3. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung;
4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif.

Arah pembangunan daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

“ *Kendal Smart City* ”

Dengan prioritas pada :

“perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih transparan dan akuntabel didukung dengan konsep *Kendal Smart City*”

Arah kebijakan ini berfokus pada peningkatan kemantapan kelembagaan daerah, peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran, peningkatan *clean and good governance*, penguatan *smart city*, yang difokuskan pada *smart government, smart education, smart health, smart economy, smart transportation*.

Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Kendal Tahun 2024 ditekankan pada :

1. Meningkatnya kualitas layanan publik melalui partisipasi masyarakat, peningkatan peran serta teknologi IT dan mendorong

- inovasi pelayanan publik;
2. Terwujudnya pelestarian kebudayaan;
 3. Terwujudnya pelestarian cagar budaya;
 4. Meningkatnya pembinaan dan promosi kesehatan kepada masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat;
 5. Melaksanakan pemberdayaan dan meningkatkan peran serta masyarakat di bidang kesehatan;
 6. Memberikan jaminan social terhadap penduduk rawan pangan;
 7. Mengembangkan semangat kebersamaan dan toleransi dalam masyarakat;
 8. Memperkuat nilai-nilai kebhinekaan dalam kehidupan bermasyarakat dan menciptakan ruang-ruang dialog antar warga;
 9. Menciptakan kondisi yang kondusif dan kerukunan dalam kehidupan masyarakat yang majemuk; dan
 10. Menumbuhkan komitmen persamaan hak dan kewajiban dalam kehidupan masyarakat yang majemuk.

Dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah menyatakan APIP adalah Instansi Pemerintah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melakukan pengawasan, terdiri atas

- BPKP yang bertanggung jawab kepada Presiden;
- Inspektorat Jenderal yang bertanggung jawab kepada Menteri/pimpinan Lembaga;
- Inspektorat Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab kepada Gubernur/Bupati/Walikota.

Sebagai salah satu unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, APIP mempunyai peranan yang penting dalam keberhasilan pembangunan nasional dengan memastikan APBN/APBD berjalan secara efektif, efisien dan terhindar dari KKN. APIP harus berperan pada siklus anggaran dari mulai tahap perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pertanggungjawaban. Inspektorat Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang didanai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan organisasi merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi organisasi yang mengandung makna :

Merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu sampai tahun terakhir Renstra.

Menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai tugas pokok dan fungsi organisasi. Meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah sasaran dan strategi organisasi berupa kebijakan, program operasional dan kegiatan pokok organisasi selama kurun waktu renstra.

Berdasarkan arahan arti dan makna penetapan tujuan organisasi tersebut maka tujuan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Kendal adalah:

“Meningkatkan tata kelola pemeritahan yang bersih dan bebas korupsi melalui penguatan peran APIP”

Sasaran adalah merupakan penjabaran dari tujuan organisasi dan menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan secara operasional. Oleh karenanya rumusan sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program operasional dan kegiatan pokok organisasi yang bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai.

Berdasarkan makna penetapan sasaran tersebut maka sampai dengan akhir tahun 2024, Inspektorat Daerah Kabupaten Kendal menetapkan sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya efektivitas pengawasan internal
2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah
3. Meningkatnya Kapabilitas APIP

Tabel 3.2.
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1	2	3	4
Meningkatkan tata kelola pemeritahan yang bersih dan bebas korupsi melalui penguatan peran APIP	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat Daerah	Mengoptimalkan perencanaan dan evaluasi kinerja	Meningkatkan kemampuan APIP dalam pelaksanaan penilaian SAKIP PD
		Mengoptimalkan Dokumen Sakip Inspektorat Daerah yang Baik dan Benar	Meningkatnya Kualitas Penyusunan Dokumen Sakip Inspektorat Daerah
	Meningkatnya efektivitas pengawasan internal	Meningkatkan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan kepatuhan terhadap Undang-Undang	Peningkatan kualitas SPIP dalam penyusunan laporan
	Meningkatnya Kapabilitas APIP	Peningkatan Kompetensi APIP dan Kualitas Pelaksanaan Pemeriksaan	Mengoptimal Kan kemampuan dan kompetensi APIP dalam melaksanakan pengawasan yang berorientasi terhadap 3E (ekonomis, efektif, efisien)
		Meningkatkan Pendampingan ke OPD terkait Pengisian LKE PMPRB yang akan dinilai	Peningkatan Kualitas Nilai PMPRB dalam Penilaian Mandiri

3.3. Program dan Kegiatan

Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program.

Rencana Program dan Kegiatan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan :

a. Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- Pendidikan dan pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

d. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan:

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub kegiatan :

- Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan :

- Penyediaan Jasa Surat menyurat
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan :

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan , Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Pemeliharaan Aset Tak Berwujud
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan Lainnya

2. Program Penyelenggaraan Pengawasan

Kegiatan :

a. Penyelenggaraan Pengawasan Internal,

Sub Kegiatan :

- Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
- Reviu Laporan Keuangan

- Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP

b. Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu

Sub Kegiatan :

- Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

Kegiatan :

a. Pendampingan dan Asistensi

Sub Kegiatan :

- Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah
- Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi
- Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
- Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas

Rumusan rencana program dan kegiatan, indikator program/kegiatan, lokasi, target capaian kinerja, dan sumber dana sebagaimana pada Tabel T-C.3.3.

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENUA OPD)
INSPEKTORAT DAERAH KAB. KENDAL
TAHUN 2024

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN TARGET RENTJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENTJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	20.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintah an yang adaptif dan kolaborasi Mewujudkan tata kelola pemerintah yang yang demokratis, transparan, akuntabel dan partisipatif serta konduktivitas daerah yang baik, harmonis berbasis smart city			22.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																
	6.01.01.2.01.0007		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				53 Laporan	125.000.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kei/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintah an yang adaptif dan kolaborasi Mewujudkan tata kelola pemerintah yang yang demokratis, transparan, akuntabel dan partisipatif serta konduktivitas daerah yang baik, harmonis berbasis smart city			180.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN TARGET RENCANA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENCANA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	198.000.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintah daerah yang adaptil dan akomodatif ke masyarakat dalam rangka pemerintah yang lebih transparan, akuntabel dan partisipatif serta konditivitas daerah yang baik, harmonis berbasis smart city	-		220.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	3.500.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintah daerah yang adaptil dan akomodatif ke masyarakat dalam rangka pemerintah yang lebih transparan, akuntabel dan partisipatif serta konditivitas daerah yang baik, harmonis berbasis smart city	-		8.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSITRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENTJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENTJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Lindungan yang Disediakan	5	6	7	8 24 Dokumen	9 3.500.000,00	10 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11 DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	12 -	13 4. Perbaikan tata kelola pemerintah yang yang demokratis, transparan, akuntabel dan partisipatif serta konditivitas daerah yang baik, harmonis berbasis smart city	14 -	15 5.000.000,00	16 INSPEKTORAT DAERAH	17
6.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	390.000.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintah yang yang demokratis, transparan, akuntabel dan partisipatif serta konditivitas daerah yang baik, harmonis berbasis smart city		450.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENUA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENUA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4 Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	5	6	7	8 1 Unit	9 85.000.000,00	10 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11 DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	12 -	13 4. Perbaikan tata kelola pemerintah an yang adaptif den kolaboratif Mewujudka n tata kelola pemerintah yang yang demokratis, transparan, akuntabel dan partisipatif serta konditivitas daerah yang baik, harmonis berbasis smart city	14 -	15 95.000.000,00	16 INSPEKTORAT DAERAH	17

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERiode RESTRICA OPD	REALISASI CAPAIAN RENTJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENTJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4 Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	5	6	7	8 4 Laporan	9 195.000.000,00	10 Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11 DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	12 -	13 4. Perbaikan tata kelola pemerintah an yang adaptil dan akuntabilit Masyarakat n tata kelola pemerintah yang yang demokratis, transparan, akuntabel dan partisipatif serta kondutivitas daerah yang baik, harmonis berbasis smart city	14 -	15 220.000.000,00	16 INSPEKTORAT DAERAH	17
6.01.022.2.01.0007		Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeniksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeniksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP				140 Dokumen	425.000.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintah an yang adaptil dan akuntabilit Masyarakat n tata kelola pemerintah yang yang demokratis, transparan, akuntabel dan partisipatif serta kondutivitas daerah yang baik, harmonis berbasis smart city	-	320.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENTJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENTJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase Ketercapaian Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	-			100 %	300.000.000,00			-	4. Perbaikan tata kelola pemerintah yang akutif dan kolaboratif Mewujudkan tata kelola pemerintah yang yang demokratis, transparan, akuntabel dan partisipatif serta konduktivitas daerah yang baik, harmonis berbasis smart city			350.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu				40 Laporan	300.000.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintah yang yang demokratis, transparan, akuntabel dan partisipatif serta konduktivitas daerah yang baik, harmonis berbasis smart city			350.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
3.	6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase hasil perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi	100.00 %			100.00 %	690.000.000.00						100.00 %	935.000.000.00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENTA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENTRA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PEMANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Peningkatan Integritas				57 perangkat daerah	150.000.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintah an yang adaptif dan kolaboratif Mewujudka n tata kelola pemerintah yang yang demokratis, transparan, akuntabel dan partisipatif serta kondidivitas daerah yang baik, harmonis berbasis smart city			270.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH	
JUMLAH								15.087.231.072,00							17.298.500.000,00		

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Rencana Kerja dan Pendanaan perangkat Daerah

Rancangan Akhir Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 pembangunan Kabupaten Kendal menitikberatkan pada mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, berbasis elektronik dan bebas korupsi, dengan memberikan ruang yang luas bagi partisipasi masyarakat dalam proses perumusan hingga evaluasi kebijakan.

Sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah sebagai unsur penunjang bidang pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, rencana program tahun 2024 menitikberatkan pada Program Penyelenggaraan Pengawasan Pelaksanaan program ini ditujukan untuk meningkatkan penyelenggaraan pengawasan internal pemerintah daerah yang secara efektif. Indikator program ini adalah persentase ketercapaiannya penyelenggaraan pengawasan di daerah. Dan Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi Pelaksanaan program ini memberikan penjaminan kualitas kepada perangkat Daerah terkait dengan SPIP, PMPRB, ZI dan Penegakan integritas.

Berdasarkan rumusan rencana program dan kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2024 yang telah disesuaikan dengan kebutuhan program, kegiatan dan anggaran pada SIPD Inspektorat Daerah Tahun 2024, untuk rancangan awal sebesar Rp. 14.146.579.000,00 (*empat belas miliar seratus empat puluh enam juta lima ratus tujuh puluh Sembilan ribu rupiah*) sedangkan rancangan akhir renja Inspektorat Daerah Kabupaten Kendal mengalami kenaikan sebesar Rp. 15.067.231.072,00 (*empat belas miliar seratus empat puluh enam juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah*), selisi dari rancangan awal dan rancangan akhir renja Inspektorat Daerah Kabupaten Kendal sebesar Rp. 920.652.072 (*Sembilan ratus dua puluh juta enam ratus lima puluh dua ribu tujuh puluh dua rupiah*) dengan rincian sebagaimana pada lampiran Rancangan Akhir RKPD 2024.

RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
INSPEKTORAT DAERAH KAB. KENDAL
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		INSPEKTORAT DAERAH														
6		UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN						15.067.231.072,00							17.298.500.000,00	
	6.01	INSPEKTORAT DAERAH						15.067.231.072,00							17.298.500.000,00	
1.	6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Ketercapaian Penunjang urusan Perangkat Daerah	100,00% 100,00% 100,00% 100,00%			100,00 %	12.462.231.072,00						100,00% 100,00% 100,00% 100,00%	13.973.500.000,00	
	6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaiannya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			100 %	145.000.000,00			-	4. Perbaikan tata kelola pemerintah an yang adaptif dan kolaboratif Mewujudka n tata kelola pemerintah yang yang demokratis, transparan, akuntabel dan partisipatif serta konditivitas daerah yang baik, harmonis berbasis smart city	-	-	202.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				8 Dokumen	20.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintah an yang adaptif dan kolaboratif Mewujudka n tata kelola pemerintah yang yang demokratis, transparan, akuntabel dan partisipatif serta konditivitas daerah yang baik, harmonis berbasis smart city		22.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	6.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				53 Laporan	125.000.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintah an yang adaptif dan kolaboratif Mewujudkan tata kelola pemerintah yang yang demokratis, transparan, akuntabel dan partisipatif serta konduktivitas daerah yang baik, harmonis berbasis smart city	-		180.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaiannya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			100 %	8.860.150.000,00			-	4. Perbaikan tata kelola pemerintah an yang adaptif dan kolaboratif Mewujudkan tata kelola pemerintah yang yang demokratis, transparan, akuntabel dan partisipatif serta konduktivitas daerah yang baik, harmonis berbasis smart city	-	-	9.928.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENCANA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAN CAPAIAN TARGET RENCANA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				150 Orang	87.000.000,00	Kab. Kendal, Kecamatan, Semua Keel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan an yang adaptif dan kolaboratif Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang yang demokratis, transparan, akuntabel dan partisipatif serta konduktivitas daerah yang baik, harmonis berbasis smart city			165.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				55 Orang	140.000.000,00	Kab. Kendal, Kecamatan, Semua Keel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan an yang adaptif dan kolaboratif Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang yang demokratis, transparan, akuntabel dan partisipatif serta konduktivitas daerah yang baik, harmonis berbasis smart city			165.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN TARGET RENCANA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENCANA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	293.929.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Mewujudkan tata kelola pemerintah yang yang demokratis, transparan, akuntabel dan partisipatif serta konditivitas daerah yang baik, harmonis berbasis smart city			500.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.2.07.0006 Pengadaan Perlatan dan Mesin Lainnya																
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	50.000.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Mewujudkan tata kelola pemerintah yang yang demokratis, transparan, akuntabel dan partisipatif serta konditivitas daerah yang baik, harmonis berbasis smart city			65.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH

[illegible]

[illegible]

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG / URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE REVISI TAHUN OPD	REALISASI CAPAIAN REVISI TAHUN OPD	PRAKIRAN CAPAIAN TARGET REVISI TAHUN OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah				150 Laporan	995.000.000,00	Kab. Kendal, Semarang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	4. Perbaikan data kecoh pemerintah yang adapif dan kolaborasi Mewujudka n tata kelola pemerintah yang yang demokratis, transparan, akuntabel dan partisipatif serta konduktivitas daerah yang baik, harmonis berbas smart city	-			1.500.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.02.2.01.0004																
Revisi Laporan Keuangan																
			Jumlah Laporan Hasil Revisi Laporan Keuangan				4 Laporan	195.000.000,00	Kab. Kendal, Semarang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	4. Perbaikan data kecoh pemerintah an yang adapif dan kolaborasi Mewujudka n tata kelola pemerintah yang yang demokratis, transparan, akuntabel dan partisipatif serta konduktivitas daerah yang baik, harmonis berbas smart city	-			220.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.02.2.01.0007																
Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APF																

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN TARGET RENCANA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAN CAPAIAN TARGET RENCANA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PRANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi/ serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi				0 Kegiatan	280.000.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintah yang yang demokratis, transparan, akuntabel dan partisipatif serta konduktivitas daerah yang baik, harmonis berbasis smart city	-		320.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.03.2.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas														
		Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas					57 perangkat daerah	150.000.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintah yang yang demokratis, transparan, akuntabel dan partisipatif serta konduktivitas daerah yang baik, harmonis berbasis smart city	-		270.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
JUMLAH								15.067.231.072,00							17.298.500.000,00	

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Perangkat Daerah Inspektorat Daerah Kabupaten Kendal disusun sebagai dokumen perencanaan kegiatan bidang pengawasan tahunan berdasarkan potensi, kekuatan dan kemampuan organisasi untuk menjadi dasar serta pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Untuk ketersediaan anggaran yang tidak sesuai kebutuhan maka dengan skala prioritas dalam penetapan kegiatan sehingga kegiatan yang dilaksanakan adalah kegiatan yang paling menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Kendal.

Rencana Kerja Perangkat Daerah Inspektorat Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan bersumber dari anggaran APBD Tahun Anggaran 2024 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu. Dokumen Renja ini berfungsi sebagai tolok ukur yang mengarahkan seluruh kegiatan dalam mencapai Visi dan Misi organisasi dengan menjabarkannya kedalam sasaran program dan kegiatan. Oleh karena itu keberhasilan pelaksanaan dokumen Renja ini akan sangat tergantung pada komitmen semua pihak yang secara fungsional terlibat dalam penyelenggaraan pengawasan pemerintah, termasuk ketersediaan sumber daya pendukung untuk terwujudnya pemerintah Kabupaten Kendal yang good government, efektif, fisien dan akuntabel. Selanjutnya Inspektorat Kabupaten Kendal dalam penyelesaian tindaklanjut pemeriksaan memberikan pemahaman kepada masing-masing OPD untuk menyelesaikan dan menindaklanjuti hasil-hasil pengawasan.

Demikian Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 kami susun semoga bermanfaat. Terima Kasih.

INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN KENDAL



TAVIP POERNOMO, S.H., M.M.

Pembina Utama Muda

NIP. NIP. 19640923 199011 1 003



BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
NOMOR : 050/ 198 /2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2024

BUPATI KENDAL,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Inspektorat Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 sehingga dapat berjalan efektif dan efisien serta tepat sasaran, maka berdasarkan ketentuan Pasal 125 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Inspektorat Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Inspektorat Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran Daerah

- Kabupaten Kendal Nomor 159) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 219);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 214);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor 9);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 12. Peraturan Bupati Kendal Nomor 74 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor 74) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 74 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Inspektorat Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Tugas Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Inspektorat Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :

1. Ketua bertugas :

a. Memimpin segenap Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Inspektorat Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 dalam pelaksanaan kegiatan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Inspektorat Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024;

b. mengoordinir segenap Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Inspektorat Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 dalam pelaksanaan, pengendalian, *monitoring* seluruh kegiatan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Inspektorat Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024; dan

c. bersama Tim menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Inspektorat Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024.

2. Sekretaris bertugas :

a. melaksanakan fungsi-fungsi kesekretariatan dan penatausahaan dalam rangka menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Inspektorat Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024; dan

b. bersama Tim menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Inspektorat Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024.

3. Koordinator Kelompok Kerja Bidang Kesekretariatan bertugas :

a. mengumpulkan data dan informasi bidang kesekretariatan dalam rangka menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Inspektorat Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024; dan

b. bersama Tim menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Inspektorat Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
NOMOR :
TANGGAL :

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2024

NO.	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Inspektur Daerah Kabupaten Kendal	Ketua	
2.	Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Kendal	Sekretaris	
3.	Kelompok Kerja Bidang Kesekretariatan		
	Sub Koordinator Perencanaan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kendal	Koordinator Kelompok Kerja	Yuliana Kurniawati, S.E.
	Kepala Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kendal	Anggota	
	Sub Koordinator Analisis dan Evaluasi pada Inspektorat Kabupaten Kendal	Anggota	Muhammad Nurfathoni, S.E. M.M.
4.	Kelompok Kerja Bidang Pengawasan		
	Inspektur Pembantu I pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kendal	Koordinator Kelompok Kerja	
	Inspektur Pembantu II pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kendal	Anggota	
	Inspektur Pembantu III pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kendal	Anggota	

4. Koordinator Kelompok Kerja Bidang Pengawasan bertugas :
 - a. mengumpulkan data dan informasi bidang pengawasan dalam rangka menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Inspektorat Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024; dan
 - b. bersama Tim menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Inspektorat Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024.
5. Anggota Kelompok Kerja bertugas membantu tugas Koordinator Kelompok Kerja masing-masing.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Ketua, Sekretaris, Koordinator Kelompok Kerja Bidang Kesekretariatan, Koordinator Kelompok Kerja Bidang Pengawasan, dan Anggota Kelompok Kerja Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Inspektorat Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Kendal.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2023.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendal

Pada tanggal 23 Mei 2023

BUPATI KENDAL



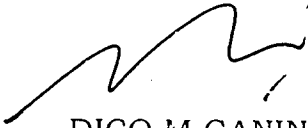
DICO M GANINDUTO

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Inspektorat Daerah Kabupaten Kendal;
 2. Kepala BPKAD Kabupaten Kendal;
 3. Segenap Anggota Tim yang bersangkutan;
 4. Arsip.
-

	Inspektur Pembantu IV pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kendal	Anggota	
	Inspektur Pembantu Pengawasan Khusus pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kendal	Anggota	

BUPATI KENDAL,



DICO M GANINDUTO

1. Pengujian atas kesesuaian rancangan akhir renja PD dengan rancangan akhir RRPD
- a. Mendapatkan kelengkapan dokumen yang dibutuhkan untuk reviu rancangan akhir renja PD

No	Dokumen	Catatan Reviu			Rekomendasi
		Ada	Tidak	Keterangan	
1	Rancangan akhir RRPD	✓	-	Sesuai	-
2	Renstra PD	✓	-	sesuai	-
3	Laporan evaluasi hasil pelaksanaan Renja PD tahun sebelumnya	✓	-	Pada Bab II: Evaluasi Pelaksanaan RENJA PD Tahun: Lalu tabel 2.2 (tabel TC-29) tahun 2023, terdapat realisasi capaian tetapi tidak mencantumkan target capaian yaitu ; 1. koordinasi dan penyusunan laporan keuangan target kosong realisasi 4 2.pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya target kosong realisasi 65 stel. 3.pengadaan mebel target kosong realisasi 2 unit 4.pemeliharaan /rehabilitasi sarpras gedung kantor atau bangunan target koosong realisasi 13 unit	1. untuk target kegiatan pada tabel 2.2 (T-C.29) bisa diisi supaya narasi gambaran evaluasi renja tahun lalu yang dipaparkan pada gambar tabel lebih jelas.
4	Berita acara forum perangkat daerah Hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan tahunan	-	✓	Data belum ada	Datanya untuk disediakan
5	Hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan tahunan	-	✓	Data belum ada	Datanya untuk disediakan
6	Berita acara hasil rapat koordinasi teknis pembangunan	-	✓	Data belum ada	Datanya untuk disediakan
7	Peraturan menteri teknis terkait standar pelayanan minimal	-	✓	Data belum ada	Datanya untuk disediakan

b. Yakinkan rumusan sasaran perangkat daerah dalam BB III rancangan akhir Renja PD telah sesuai dengan sasaran pada BAB IV yang ditetapkan dalam rancangan akhir RRPD

No	Sasaran Perangkat Daerah Dalam Rancangan Akhir Renja PD	Sasaran Pada Rancangan Akhir RRPD	Catatan Reviu		
			Sesuai	Tidak Sesuai	Rekomendasi
1.	meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Meningkatnya birokrasi yang akuntabel	✓	-	-
2.	meningkatkan efektifitas pengawasan internal	Meningkatnya birokrasi yang akuntabel	✓	-	-
3.	meningkatkan kapabilitas AP/PP	Meningkatnya kualitas pelayanan Publik	✓	-	-

2. Pengujian atas penyusunan substansi antar BAB rancangan akhir Renja PD
- a. Yakinkan tujuan dan sasaran Renja, program dan kegiatan pada BAB III Renja PD didasarkan pada isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah BAB II

No	Tujuan dan sasaran Renja, Program dan Kegiatan		Catatan Reviu		
			Sesuai	Tidak Sesuai	Rekomendasi
1	2		4	5	6
1.	Tujuan :				
a.	meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi melalui penguatan peran APP	tuntutan peningkatan integritas dalam penyelenggaraan tat kelola pemerintahan yang baik dan bersih, terutama pada upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi.	v	-	-
2.	Sasaran :				
a.	meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	tuntutan peningkatan integritas dalam penyelenggaraan tat kelola pemerintahan yang baik dan bersih, terutama pada upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi.	v	-	-
b.	meningkatkan efektivitas pengawasan internal	optimalnya penerapan sistem pengendalian intern pemerintah di jajaran organisasi perangkat daerah.	v	-	-
c.	meningkatkan kapabilitas APP	tuntutan peningkatan kapabilitas APP	v	-	-

3.	Program dan kegiatan				
a.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA				
-	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	tuntutan peningkatan pelayanan publik kepada masyarakat	√	-	-
-	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	tuntutan peningkatan pelayanan publik kepada masyarakat	√	-	-
-	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	tuntutan peningkatan pelayanan publik kepada masyarakat	√	-	-
-	Administrasi Umum Perangkat Daerah	tuntutan peningkatan pelayanan publik kepada masyarakat	√	-	-
-	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	tuntutan peningkatan pelayanan publik kepada masyarakat	√	-	-
-	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	tuntutan peningkatan pelayanan publik kepada masyarakat	√	-	-
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	tuntutan peningkatan pelayanan publik kepada masyarakat	√	-	-
b.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN;		√	-	-
-	<i>Penyelenggaraan Pengawasan Internal</i>	optimalnya penerapan sistem pengendalian intern pemerintahan di jajaran OPD	√	-	-
-	<i>Penyelenggaraan Pengawasan dengan tujuan Tertentu</i>	masih banyaknya aduan masyarakat terhadap pelayanan publik	√	-	-
c	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASSISTENSI ;		√	-	-

-	Pendampingan dan Asistensi	belum optimalnya manajemen pengelolaan data di setiap OPD sehingga berdampak pada pengukuran evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pengawasan	V	-	-

2. Pengujian atas penyusunan substansi antar BAB rancangan akhir Renja PD
- b. Yakinkan kinerja kegiatan / sub kegiatan mendukung kinerja program Renja PD dan Renstra PD

No	Kinerja Program Renja PD dan Renstra PD	Kinerja Kegiatan / Sub Kegiatan	Catatan Reviu		
			Sesuai	Tidak Sesuai	Rekomendasi/catatan
	Program Renja PD	Kinerja Kegiatan Renja PD			
	PROGRAM PENYELÉNGGARAAN				
1.	PENGAWASAN				
-		Penyelenggaraan Pengawasan	✓	-	
		a. Internal			
		sub keg;			
-		Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	✓	-	
-		Reviu Laporan Keuangan	✓	-	
		Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	✓	-	
-		Penyelenggaraan Pengawasan	✓	-	
		b. dengan Tujuan Tertentu			
		sub kegiatan;			
-		Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	✓	-	
2.	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI		✓	-	
-		a.	✓	-	
		Pendampingan dan Asistensi			
		sub keg;			
		Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	✓	-	

		Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	✓	-	
		Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	✓	-	belum memuat indikator kinerja dan Target capaian
		Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	✓	-	
3. PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN DAERAH				
	a.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	✓	-	
		sub keg;			
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	✓	-	
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	✓	-	
	b.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	✓	-	
		sub keg;			
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	✓	-	indikator kinerja sub kegiatan yang terdapat pada Renja PD belum konsisten dengan indikator kinerja sub kegiatan pada Renstra PD
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	✓	-	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	✓	-	
	c.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	✓	-	
		sub keg;			

		Pengadaan Pakaiannya	✓	-	
		atribut Kelengkapannya			
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	✓	-	
		socialisasi peraturan perundang undangan	✓	-	
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	✓	-	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	✓	-	
		sub key;			
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	✓	-	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	✓	-	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	✓	-	
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	✓	-	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	✓	-	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	✓	-	
		e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	✓	-	
		sub key;			
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	✓	-	
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	✓	-	
		f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	✓	-	

		sub keg;			
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	✓	-	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	✓	-	
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	✓	-	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	✓	-	
	g.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	✓	-	
		sub keg;			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	✓	-	
		Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	✓	-	sub kegiatan tidak masuk pada Renstra
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	✓	-	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	✓	-	
	j.				

penerima/ INSPEKTORAT

.....

tim review

- 1 Dwi Jatmiko Aridhy K,ST.MM.....
- 2 Bambang Surono,SH.MM.....
- 3 Achmad Ashar S.Sos.....
- 4 Musdalifah, S.Sos.....

		sub keg;			
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	✓	-	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	✓	-	
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	✓	-	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	✓	-	
	9.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	✓	-	
		sub keg;			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	✓	-	
		Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	✓	-	sub kegiatan tidak masuk pada Renstra
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	✓	-	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	✓	-	
	j.				

penerima/ INSPEKTORAT

.....

tim review

- 1 Dwi Jatmiko Andhy K,ST.MM.....
- 2 Bambang Surono,SH.MM.....
- 3 Achmad Ashar S.Sos.....
- 4 Musdalifah, S.Sos.....